**WTP ke 6 Pemkab HSU Teken MoU Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat**

****

**Sumber gambar:**

[*https://kalselpos.com/2021/12/02/wtp-ke-6-pemkab-hsu-teken-mou-tingkatkan-kesejahteraan-masyarakat/*](https://kalselpos.com/2021/12/02/wtp-ke-6-pemkab-hsu-teken-mou-tingkatkan-kesejahteraan-masyarakat/)

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara ( HSU) juga melakukan penandatanganan nota kesepakatan antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan.

Selain itu, dalam agenda tersebut pemkab HSU menerima plakat dan piagam penghargaan WTP tahun 2020 pada Rabu (1/12) di Aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan Sulaimansyah, SE mengatakan, ada 2 agenda dalam pertemuan ini, yang pertama penyerahan piagam WTP yang mana diserahkan oleh Kementerian Keuangan RI kepada Pemerintah Kabupaten HSU yang telah berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian, bahkan terhitung kali ini sudah 6 kali berturut-turut.

“Dengan adanya penghargaan ini, tidak hanya menjadi semangat untuk mempertahankan prestasi tapi juga feedback dari kebijakan keuangan daerah bisa betul-betul dirasakan manfaatnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Agenda kedua yakni penandatanganan nota kesepakatan antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalsel dengan Pemerintah Kabupaten HSU dalam rangka meningkatkan sinergi pengelolaan fiskal dan perekonomian yang kuat untuk kesejahteraan.

Sinergi yang terjalin selama ini antara Pemerintah Kabupaten HSU dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, baik menyangkut APBD maupun APBN bagaimana, progres dan realisasinya, sehingga penyerapan anggaran menjadi lebih baik

Menteri Keuangan RI meminta sinergi ini lebih ditingkatkan lagi dengan mengembangkan beberapa aspek diantaranya, melakukan kajian dampak perekonomian terhadap fiskal di daerah dan sebaliknya melakukan analisis dan evaluasi penyerapan belanja APBD dan APBDes, mendampingi Pemda dalam menghubungkan berbagai kebijakan fiskal pusat dengan kebijakan fiskal daerah, serta pembinaan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Terhitung sampai tanggal 30 November 2021, total realisasi penyaluran Dana DAK Fisik Kabupaten HSU sebesar 53% dari pagu sebesar Rp. 86 Miliar sedangkan total realisasi penyaluran Dana Desa Kabupaten HSU sebesar Rp.172,1 Milyar atau 99,85% dari pagu sebesar Rp.172,3 Milyar.

“Pemerintah Pusat sudah menyediakan anggaran maka sangat disayangkan bila tidak dioptimalkan” ungkap Sulaiman.

Sulaiman juga menambahkan, nantinya Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalsel akan melakukan kerjasama dengan Pemda untuk membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di HSU.

Dalam hal ini Disperindagkop dan UKM HSU melalui peningkatan akses pembiayaan UMKM melalui Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang merupakan bagian dari penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19,

“Jadi KUR yang bunganya semula 6% akan kami subsidi bunga sebesar 3%” terangnya.

Lanjutnya, lagi Selain itu juga ada Program Pembiayaan Ultra Mikro (UMI) yang bertujuan menyediakan pembiayaan yang mudah dan cepat untuk usaha mikro yang tidak difasilitasi oleh KUR. Jadi kita bisa bantu UMKM dengan Pembiayaan Ultra Mikro melalui Disperindagkop dan UKM HSU.

Plt. Bupati HSU H. Husairi Abdi, Lc menyebutkan juga dapat banyak informasi guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten HSU.

“Apa yang menjadi masukan dari Kementerian Keuangan selalu kita koordinasikan dengan BPKAD HSU,” ungkapnya.

**Sumber berita:**

1. <https://kalselpos.com/2021/12/02/wtp-ke-6-pemkab-hsu-teken-mou-tingkatkan-kesejahteraan-masyarakat/>, *WTP ke 6 Pemkab HSU Teken MoU Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat,* 2 Desember 2021.
2. <https://wartaniaga.com/2021/12/pemkab-hsu-teken-muo-tingkatkan-kesejahteraan-masyarakat/>, *Pemkab HSU Teken MuO Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat,* 2 Desember 2021.

**Catatan Berita:**

* Laporan Keuangan Pemerintah terdiri atas dua jenis, yaitu (PSAP Nomor 01):
1. Laporan pelaksanaan anggaran *(budgetary reports)*;

Laporan pelaksanaan anggaran terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo (SAL)

1. Laporan financial (*financial report*).

Laporan financial terdiri atas Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Sumber: <https://www.scribd.com>

* **Menurut SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik), opini audit ada 5 macam, yaitu :**
* **Pendapat wajar tanpa pengecualian (**Unqualified Opinion**) – WTP**

Pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

* **Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan (Modified Unqualified Opinion) – WTP – DPP**

Keadaan tertentu mungkin mengharuskan auditor menambahkan suatu paragraf penjelasan (atau bahasa penjelasan yang lain) dalam laporan auditnya.

* **Pendapat wajar dengan pengecualian (**qualified opinion**) – WDP**

Pendapat wajar dengan pengecualian, menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

* **Pendapat tidak wajar (**Adverse Opinion**) – TW**

Pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

* **Pernyataan tidak memberikan pendapat (**Disclaimer of Opinion**) – TMP**

Pernyataan tidak memberikan pendapat menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan.